

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi

Standar akuntansi sangat penting ketika membuat catatan keuangan karena memastikan bahwa informasi ditampilkan dengan cara yang jelas, seragam, dan dapat dipercaya. Dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan perusahaan menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dibandingkan, baik dari waktu ke waktu maupun dengan perusahaan lain, ini membantu kreditor dan investor dalam mengevaluasi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penerapan standar akuntansi juga memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi aturan yang berlaku, seperti IFRS atau GAAP, sehingga meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum. Standar akuntansi juga berfungsi sebagai perlindungan dari potensi manipulasi data keuangan, karena perusahaan tidak dapat dengan mudah mengubah angka demi kepentingan tertentu. Dengan demikian, standar akuntansi tidak hanya menjaga integritas laporan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan yang dibuat dan disebarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk mengontrol bagaimana pencatatan keuangan

dibuat di Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai pedoman dalam pencatatan, penyusunan, serta penyajian data akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki format yang seragam dan dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna. Dengan adanya SAK, informasi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diandalkan untuk keperluan analisis serta pengambilan keputusan.

Bagian dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). SAK berfungsi sebagai standar untuk laporan keuangan. PSAK yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 115, yang mengatur bagaimana pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui. PSAK adalah aturan yang mengatur bagaimana pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dicatat. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) 15 adalah asal PSAK 115 menggantikan PSAK 72. Standar ini menetapkan lima langkah untuk mengakui pendapatan: (1) mencari tahu apa kontrak dengan pelanggan, (2) mencari tahu apa kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, (3) mencari tahu harga transaksi, (4) mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan, dan (5) mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja telah dipenuhi. PSAK 115 ingin membuat informasi tentang pendapatan berbasis kontrak lebih berguna dan jelas sehingga orang yang menggunakan catatan keuangan dapat memahami jenis, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan berbasis kontrak dan arus kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

2.1.2. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuknya aktiva atau peningkatan atas aktiva yang dihasilkan dari operasi bisnis perusahaan dan sudah menyelesaikan kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya . Dalam buku *Intermediate Accounting IFRS Edition*, Kieso *et al.* (2011) menyatakan bahwa salah satu elemen terpenting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu bisnis adalah pendapatan. Pendapatan merupakan penentu utama untuk menghitung laba atau rugi perusahaan untuk periode tertentu.

Pendapatan adalah jumlah pemasukkan yang diperoleh bisnis melalui aktivitas normalnya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dapat menyebabkan properti tumbuh dengan cara yang bukan disebabkan oleh pembayaran pemilik. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2022), dalam akuntansi perusahaan dapat mencatat pendapatan saat telah melaksanakan tugasnya kepada pelanggan, baik saat pelanggan menerima produk atau layanan atau selama jangka waktu kontrak.

2.1.3 Kontrak dengan Pelanggan

Demikian yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro (1986) dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Perjanjian* perjanjian atau kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan harta kekayaan antara dua pihak. Pihak yang satu harus berbuat sesuatu dan pihak yang lain dapat menuntut agar janji itu ditepati. Sementara itu Sudikno Mertokusumo

(2013) kontrak didasarkan pada sejumlah asas, termasuk konsensualisme, yaitu kesepakatan antara semua pihak yang terlibat; asas kepercayaan, yang menunjukkan keyakinan bahwa masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya; serta asas keseimbangan, yang memastikan adanya keadilan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Kontrak dengan pelanggan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum dan menetapkan hak dan kewajiban yang terkait dengan pengiriman barang atau layanan. Kieso *et al.* (2020). Agar mengikat secara hukum, kontrak harus mencakup pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban, serta konten bisnis yang dapat mempengaruhi arus kas masa depan.

Sementara itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (2022) menjelaskan bahwa kontrak harus dapat diidentifikasi dan memiliki jangka waktu pembayaran yang jelas, serta harus memenuhi syarat untuk diakui sebagai kontrak yang sah.

2.1.4 Pengakuan Pendapatan

Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa suatu bisnis harus mencatat pendapatan ketika kemungkinan besar akan menerima manfaat ekonomi dan ketika manfaat tersebut dapat diukur dengan benar. Berdasarkan konsep ini, empat pendapatan dapat dicatat.

1. Saat barang terjual, perusahaan mencatat uang yang diperolehnya. Umumnya, tanggal ini dianggap sebagai tanggal saat barang dikirim ke pelanggan.
2. Perusahaan mencatat pendapatan dari layanan yang diberikan kepada pelanggan setelah pekerjaan selesai dan dapat ditagih.
3. Perusahaan mencatat pendapatan yang diperolehnya dengan memberikan akses kepada orang lain menggunakan asetnya. Misalnya, perusahaan mencatat bunga, sewa, dan biaya dari waktu ke waktu atau saat aset digunakan.
4. Perusahaan mencatat pendapatan saat menjual barang selain barang yang biasanya dijual pada tanggal penjualan.

Dalam prinsip pengakuan pendapatan dicatat ketika jasa selesai dilaksanakan atau produk sudah diterima oleh pelanggan. Biasanya pendapatan diukur sebesar aset yang diterima, misalnya kas atau piutang usaha.

Pengakuan pendapatan adalah proses penting dalam akuntansi yang menentukan kapan dan bagaimana pendapatan diakui dalam laporan keuangan. Kieso *et al.* (2019) mengatakan bahwa perusahaan mengakui pendapatan ketika telah memenuhi kewajiban kinerja yang ditetapkan dalam kesepakatan dengan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyerahkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan.

Menurut Kieso *et al.* (2019) mengatakan bahwa terdapat dua model pengakuan pendapatan yang bisa diakui atas dasar:

1. Akruai (*Accrual Basis*)

Menurut metode akrual perusahaan mengakui pendapatan setelah memberikan barang/jasa (bukan setelah menerima kas). Sehingga dalam praktiknya berdasarkan basis ini, meskipun kas belum diterima atas penyerahan barang ataupun jasa maka transaksi tersebut sudah dicatat dan diakui Perusahaan sebagai suatu pendapatan. Oleh karena itu, jika berdasarkan metode *accrual basis* maka akan diakui sebagai piutang karena pendapatan belum dibayarkan oleh pelanggan.

2. Dasar Kejadian Penting (*Cash Basis*)

Perusahaan mengakui pendapatan saat mereka menerima kas. Berdasarkan basis ini, Perusahaan menghitung pendapatan atau pengeluaran dari penerimaan dan pengeluaran kas. Sehingga pendapatan dari penjualan barang/jasa menerapkan *cash basis* hanya dapat diperhitungkan ketika tagihan pelanggan sudah diterima.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2024) mengatakan bahwa pendapatan harus diakui dengan menggunakan prinsip akrual yang berarti pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat kas diterima. Hal ini senada dengan yang disampaikan pada jurnal Analisis Pengakuan Pendapatan dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glenmore Berdasarkan PSAK 115, Farha *et al.* (2024) tentang bagaimana pengakuan

pendapatan seharusnya menggambarkan keadaan sebenarnya dalam perekonomian perusahaan sehingga orang yang menggunakan catatan keuangan dapat memperoleh informasi yang benar dan berguna dari catatan tersebut.

2.1.5 Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan hanya dapat diakui jika ada kontrak yang sah antara kedua pihak, tanpa adanya kontrak, perusahaan tidak memiliki hak maupun kewajiban yang dapat menimbulkan aset atau liabilitas. Selain itu, sebuah kontrak harus bersifat sukarela, artinya tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak agar kontrak dapat dianggap sah. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa kontrak

dengan pelanggan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam hal ini, sejumlah persyaratan PSAK 115 paragraf 09 menyatakan suatu kontrak dengan pelanggan hanya diakui apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1. Kedua belah pihak dalam kontrak telah menyetujuinya (baik secara tertulis, informal, atau seperti yang lazim dalam bisnis) dan berkomitmen untuk melakukan apa yang telah disetujui;
2. Perusahaan dapat menentukan hak apa yang dimiliki masing-masing pihak terhadap barang atau jasa yang dipindahkan;
3. Perusahaan dapat memutuskan cara membayar barang atau jasa yang dikirim;

4. Kesepakatan tersebut memiliki substansi ekonomi, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut kemungkinan akan mengubah risiko, tanggal, atau jumlah arus kas masa depan entitas;
5. Ada kemungkinan besar bahwa perusahaan akan mendapatkan pembayaran yang menjadi haknya untuk barang atau jasa yang akan disediakan kepada pelanggan.

Jika sejak awal suatu kontrak dengan pelanggan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka perusahaan tidak perlu meninjau ulang kriteria tersebut, kecuali terjadi perubahan besar dalam kondisi atau keadaan. Namun, jika kontrak tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, perusahaan harus terus mengevaluasi apakah persyaratan berikutnya dapat dipenuhi.

Imbalan yang diterima dari pelanggan dapat diakui sebagai pendapatan apabila entitas telah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam kontrak dan imbalan tersebut bersifat tidak dapat dikembalikan. Selain itu, apabila kontrak dihentikan dan entitas tetap menerima imbalan yang tidak dapat ditarik kembali, maka jumlah tersebut juga dapat diakui. Namun, jika salah satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka imbalan yang diterima harus dicatat sebagai kewajiban hingga persyaratan pengakuan pendapatan terpenuhi.

2.1.6 Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak

Setelah kontrak berhasil disepakati, perusahaan akan memutuskan barang, jasa, atau campuran dari keduanya yang akan diakui sebagai pemenuhan kewajiban. Selain barang atau jasa yang secara khusus tercantum dalam kontrak dengan pelanggan, pihak - pihak juga dapat terikat oleh kesepakatan yang umum dalam dunia bisnis, kebijakan perusahaan, atau bahkan informasi dalam laporan yang lebih mendalam. Dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, perusahaan menilai dan mengidentifikasi setiap janji pengalihan kepada pelanggan untuk:

1. Suatu barang atau jasa yang dapat dibedakan;
2. sekelompok barang atau jasa yang dapat dibedakan tetapi sebagian besar sama dan ditransfer dengan cara yang sama.

Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan apabila kedua kriteria berikut terpenuhi :

1. Pelanggan memperoleh sesuatu dari barang atau jasa, baik sendiri maupun dengan alat lain yang mudah diaksesnya;
2. Pelanggan dapat membedakan janji entitas untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan dari janji lain dalam kontrak.

2.1.7 Menentukan Harga Transaksi.

Jika perusahaan tidak dibayar oleh pihak ketiga, harga transaksi adalah jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Perkiraan harga pembelian menunjukkan

berapa banyak yang menurut perusahaan akan dibayarkan oleh pelanggan. Perusahaan harus melihat ketentuan transaksi dan praktik bisnis standar untuk menentukan harga transaksi. Cara menghitung harga transaksi akan bergantung pada hal-hal seperti jenis, waktu, dan jumlah pembayaran yang dijanjikan pelanggan.

2.1.8 Mengalokasikan harga Transaksi Kepada Kewajiban Pelaksanaan

Setelah perusahaan mengetahui harga transaksi, perusahaan dapat menetapkan jumlah tersebut untuk setiap tugas pelaksanaan dalam kontrak. Untuk langkah ini, perusahaan harus menuliskan berapa banyak uang yang mereka harapkan sebagai imbalan atas pemindahan barang atau jasa yang disetujui pelanggan.

Harga transaksi dibagi antara setiap tanggung jawab kinerja atau setiap barang atau jasa terpisah dalam transaksi. Untuk membuat keputusan ini, jumlah uang yang seharusnya diperoleh perusahaan untuk setiap tugas diperhitungkan.

Ketika perusahaan menetapkan harga transaksi, mereka dapat menggunakan harga jual relatif untuk menentukan berapa biaya yang harus dibebankan untuk setiap tugas pelaksanaan yang disepakati dalam kontrak. Perusahaan harus memutuskan harga jual berdiri sendiri (*relative stand-alone selling price*) merupakan harga yang sudah ditentukan dan dijanjikan oleh perusahaan dijual secara terpisah. yang akan digunakan jika barang atau jasa dijual tanpa kontrak. Hal ini berlaku kecuali untuk situasi yang

melibatkan alokasi diskon dan alokasi pembayaran yang menggunakan faktor.

PSAK 115 menyatakan bahwa suatu badan dapat menentukan sendiri harga jualnya dengan tiga cara:

1. *Adjusted market assessment approach* – perusahaan melakukan evaluasi pada pasar dan memperkirakan jumlah tertentu yang ingin dibayarkan oleh pelanggan untuk barang atau jasa tersebut.
2. *Expected cost plus a margin approach* – Bisnis melakukan estimasi biaya terpisah untuk memenuhi persyaratan kinerja dan kemudian menambahkan jumlah laba yang tepat untuk barang atau jasa.
3. *Residual approach* – Perusahaan melakukan perkiraan estimasi harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa lain dalam kontrak yang diketahui nilainya.

Setelah perusahaan selesai menggabungkan dari metode yang ada di atas, perusahaan harus melakukan evaluasi apakah gabungan metode yang dipilih telah memenuhi syarat dan mampu mencapai tujuan pengalokasian harga transaksi.

2.1.9 Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi.

Bila perusahaan telah melakukan apa yang telah disepakati dan memberikan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, perusahaan dapat mencatat pendapatan. Bila pelanggan mengambil alih kendali atas suatu barang, barang tersebut dikatakan telah dipindahkan.

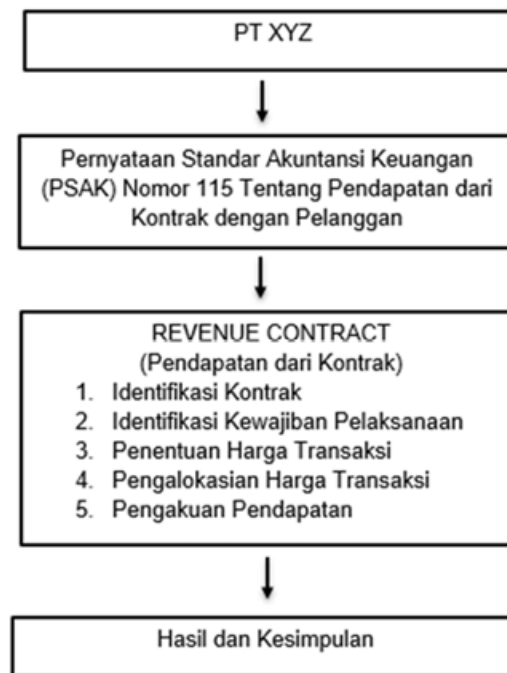
Ada dua jenis penyelesaian kewajiban: penyelesaian kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu (*Performance Obligation Over Time*) dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu (*Performance Obligation At a Point In Time*). Saat menghitung berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan, jika perusahaan menyelesaikan kontrak pelaksanaan sepanjang waktu, salah satu dari tiga hal ini harus benar:

1. Selama perusahaan menjalankan tugasnya, pelanggan mendapatkan dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh kinerja perusahaan tersebut.
2. Kinerja perusahaan membuat aset (seperti pekerjaan yang sedang berlangsung) yang dikendalikan oleh pelanggan saat aset tersebut dibuat atau ditingkatkan.
3. Selama kinerja entitas tidak menciptakan produk yang dapat digunakan dengan cara berbeda, entitas tersebut berhak menerima bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya pada titik waktu tertentu jika tidak dapat melakukannya secara teratur. Perusahaan melihat persyaratan kontrol untuk mengetahui saat yang tepat ketika pelanggan mengambil alih aset yang dijanjikan dan bisnis memenuhi tanggung jawab kinerjanya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan alur analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT XYZ. Proses dimulai dari penetapan objek penelitian, yaitu PT XYZ, yang menjadi subjek evaluasi atas penerapan standar akuntansi tersebut. Selanjutnya, penelitian berlandaskan pada PSAK 115 yang merupakan dasar teoritis dalam pengakuan pendapatan berdasarkan kontrak dengan pelanggan. Inti dari kerangka ini adalah penerapan lima langkah dalam yang ditetapkan oleh PSAK 115, yaitu: identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, pengalokasian harga transaksi, dan pengakuan pendapatan. Kelima langkah ini dianalisis untuk menilai sejauh mana PT XYZ telah menerapkan standar tersebut secara tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Akhir dari kerangka ini adalah penarikan hasil dan kesimpulan dari seluruh proses analisis, yang dapat berupa tingkat kepatuhan terhadap PSAK 115 maupun rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaporan pendapatan.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2025)

2.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan bagian penting yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan memperkuat landasan teori maupun fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai berbagai pendekatan, metode, serta temuan yang relevan dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan awal dalam merumuskan arah dan ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi utama dalam penyusunan penelitian ini, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Analisis Pengakuan Pendapatan Dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glenmore Berdasarkan PSAK 115	(Hasanah & Musfiroh, 2024)	Pengakuan pendapatan Perusahaan telah sesuai dengan lima tahapan yang terdapat dalam PSAK No. 115
2	Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Outsourcing PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia Berdasarkan PSAK NO. 155	(Islami & Sundari, 2024)	Perusahaan mencatat pendapatan pada saat kewajiban telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan PSAK, Dimana pendapatan hanya dapat diakui setelah kewajiban telah diselesaikan
3	Analisis Pengakuan Pendapatan Kontrak Berdasarkan PSAK 115 Pada PT Syma Berkah Indonesia	(Rachman & Sundari, 2024)	Penelitian ini menunjukkan perusahaan menerapkan PSAK 115 dengan tepat untuk pengakuan pendapatan kontrak
4	Analisis Implementasi Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Berdasarkan Pernyataan Akuntansi Keuangan 72 Pada Perusahaan	(Ratumanik dkk, 2024)	Implementasi PSAK 72 pada PT X khusus nya pada proyek yang diteliti perlu dilakukan penyesuaian dalam mengakui dan mengukur pendapatan yang paling sesuai dengan kontrak yang dikerjakan, agar pendapatan dan biaya yang diakui dapat diukur dengan akurat.

	Konstruksi Studi Kasus Pada PT X		
5	Perlakuan Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan pada PT “X” di Surabaya	(Zuhroh dkk, 2024)	PT “X” mencatat serta mengakui seluruh penerimaan pembayaran sebagai pendapatan pada priode atau bulan yang sama sebagai dasar menyusun laporan laba rugi bulanan..